



## Peran Mesin Partai Politik Dalam Pembentukan Dinasti Ratu Atut Chosiyah di Provinsi Banten

Iqbal Hafhari<sup>1</sup>, Lusi Andriyani<sup>2</sup>, Asep Setiawan<sup>3</sup>

Magister Ilmu Politik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Muhammadiyah Jakarta<sup>1,2,3</sup>

### Informasi Artikel

#### History of Article

Received 2022-07-18

Accepted 2022-07-28

Published 2022-07-31

*Keywords:* Political Party, Political Recruitment, Political Dynasty

Kata kunci : Partai Politik, Rekrutmen Politik, Dinasti Politik

### Abstrak

Kajian menarsikan tentang partai politik, rekrutmen partai dalam proses pembentukan dinasti politik di Banten. Penelitian ini bertujuan untuk melihat bagaimana partai politik dalam proses rekrutmen politik tersebut memperkuat terjadinya proses pembentukan dinasti politik di Provinsi Banten dimulai dari Tubagus Chasan Shohib (Ayah Kandung Ratu Atut/Tokoh Kuat Lokal) yang menjadikan Ratu Atut Chosiyah sebagai Wakil Gubernur Banten 2001 dan Gubernur Banten 2007-2017. Metode penelitian yang digunakan ialah kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data sekunder publikasi ilmiah baik jurnal, artikel ilmiah, dan media mainstream yang dipilih secara ketat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa belum ada satupun tokoh partai lokal yang mampu mengalahkan pengaruh hegemoni kekuasaan dinasti Ratu Atut dalam setiap pertarungan konstelasi politik di Banten. Kebaruan dalam kajian ini berkaitan dengan penguasaan peta politik dan kemampuan mesin partai dalam melakukan design untuk melangengkan dinasti Atut. Dinasti sangat menguasai basis/peta politik yang didukung sumber ekonomi, sosial, politik yang kuat. Oleh sebab itu, partai politik memiliki kecenderungan tidak berdaya dan pragmatis dalam rekrutmen kepala daerah.

### Abstract

This study will describe political parties, party recruitment in the process of forming political dynasties in Banten. This study aims to see how political parties in the political recruitment process strengthen the process of forming a political dynasty in Banten Province starting from Tubagus Chasan Shohib (Ratu Atut's biological father/Local Strong Figure) who made Ratu Atut Chosiyah as Deputy Governor of Banten 2001 and Governor of Banten 2007-2017. The research method used is descriptive qualitative with secondary data collection techniques for scientific publications, both journals, scientific articles, and strictly selected mainstream media. The results showed that there was no local party figure who was able to defeat the hegemonic influence of the Ratu Atut dynasty in every political constellation battle in Banten. The novelty of research studys is the power of Atut dinasti and political party to design Atut political dinasti. The novelty of the research about mapping competention for teamwork to goal the aoim of political dynasty. The dynasty really controlled the political base/map that was supported by strong economic, social and political sources. Therefore, political parties have a tendency to be helpless and pragmatic in the recruitment of regional heads

© 2019, Universitas Negeri Semarang

ISSN 2549-5011

□ Corresponding author :

Address: FISIP Universitas Muhammadiyah Jakarta, Jl. KH Ahmad Dahlan, Cirendeudeu, Ciputat, Tangerang Selatan  
E-mail: [lusi.andriyani@umi.ac.id](mailto:lusi.andriyani@umi.ac.id)

## PENDAHULUAN

Demokrasi pasca reformasi tidak mengalami perubahan ke arah yang lebih baik, secara model berbeda hanya substansinya sama yaitu terjadinya dinasti politik lokal bersamaan hadirnya reformasi dan semangat otonomi daerah. Sebelum reformasi, dinasti politik tersentralistik hanya dalam lingkaran kekuasaan keluarga Soeharto saja. Pasca reformasi, muncul raja-raja lokal yang dikuasai segelintir elit tertentu.

Dinasti politik bukan sesuatu fenomena yang baru karena bangsa Indonesia memiliki akar budaya feodal sebelum terbentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) saat Indonesia masih menjadi kerajaan-kerajaan dan rakyat tunduk terhadap apapun keputusan atau kebijakan raja. Sisa monarki dan feodal itu masih melekat sampai sekarang walaupun semangat kita untuk keluar dari bayang-bayang penindasan otoritarian ke demokrasi itu menyebabkan terjadinya berkembang-biakan atau *proliferasi* dinasti politik dalam konteks lokal dan menjadi masalah baru.

Dinasti politik merupakan sistem memproduksi kembali kekuasaan yang lampau dengan memfungsikan keturunan dan darah dari dan hanya segelintir orang saja. Sedangkan politik dinasti merupakan proses menempatkan regenerasi politik ke dalam struktur kekuasaan bagi kepentingan keluarga elit tertentu yang berorientasi untuk menjaga dan mempertahankan status-quo (Martin;2018). Pendapat lain, politik dinasti mengarah kepada satu keluarga yang menduduki jabatan strategis dengan cara berurutan untuk sama atau dengan cara bersamaan di berbagai kedudukan yang berbeda (Fitriyah; 2020).

Ciri-ciri pembentukan dinasti politik ada dua yaitu, *pertama*, partai politik mengalami sumbatan dalam rekrutment kaderisasi/kandidasi kepada calon kepala daerah karena partai politik mengalami degradasi etis dan cenderung mendorong calon yang berlatar belakang memiliki hubungan

kerabat dengan kekuatan lokal, tujuannya motif ekonomi (Susanti, 2018). Gambaran ini yang terjadi di dinasti Atut Banten dan sebagai salah satu poin penting dalam kajian ini. *Kedua*, adanya sikap penerimaan publik untuk merawat dan mempertahankan dinasti politik dan mendorong kerabat politik lingkaran petahana untuk menggantikan petahana setelah habis masa jabatan (Winda;2018).

Proses politik dinasti keluarga atau familisme ke berbagai lini posisi penting baik di pemerintahan dan parlemen melalui proses rekrutmen partai politik, mengindikasikan adanya problem “penyakit kronis” serius dialami partai politik. Sebenarnya, masalah *kran* dinasti politik pernah ditutup oleh regulasi sebagaimana yang tertera dalam pasal 7 huruf (r) UU No. 8 Tahun 2015 Tentang Pemilihan Gubernur, Walikota, dan Bupati ; “WNI yang bisa menjadi Cagub/Cawagub, Cabup/Cawabup, serta calon Walikota/Wakil Walikota adalah yang melengkapi syarat tidak punya potensi konflik kepentingan dengan incumbent/petahana.”

Gambaran politik dinasti telah disampaikan oleh direktur eksekutif Akbar Faizal memaparkan data hasil penelitian Nagara Institute bahwa ada 124 calon kepala daerah yang mengikuti kontestasi pilkada serentak tahun 2020 terpapar dinasti politik. Misalnya, Calon Walikota Solo Gibran (putra pertama Presiden Jokowi) sebagai calon tunggal, Calon Walikota Medan Bobby Nasution (menantu Presiden Jokowi), calon Bupati Kediri Hanindhito Himawan Permana (putra pertama Bpk. Pramono Anung/Menteri Sekretaris Kabinet Jokowi) sebagai calon tunggal, Calon Bupati Serang Ratu Tatu Chasanah (Adik kandung Ratu Atut Chosiyah/Mantan Gubernur Banten 2007-2017), Calon Wakil Walikota Tangerang Selatan Pilar Saga Ichsan (Keponakan Ratu Atut Chosiyah Mantan Gubernur Banten 2007-2017), calon Bupati Gowa Adnan Purichta Ichsan (keponakan dari Syahrul Yasin Limpo/Mantan Gubernur Sulawesi Selatan 2008-2018 dan anak kandung Ichsan Yasin Limpo/Mantan Bupati Gowa) sebagai calon

tunggal dsb. Angka ini terus meningkat dibandingkan pilkada 2015, 2017, dan 2018 ada 86 calon kandidat terafiliasi dinasti. Sebelum putusan MK No. 33/PUU-XIII/2015 tentang melegalkan dinasti politik, calon kandidat yang bertarung tahun 2005-2014 hanya 59 daerah terpapar dinasti.

Lahirnya politik yang berbasis kekerabatan diatas sebagai salah satu implikasi dari keputusan Mahkamah Konstitusi yang membatalkan peraturan larangan bagi calon kepala daerah yang terpapar dinasti politik untuk maju. Kondisi tersebut akan berdampak pada semakin leluasa bagi partai politik untuk memperdagangkan tiket kandidasi calon kepala daerah dengan menukarkan syarat minimal kursi pencalonan sebagaimana diatur dalam UU Pemilu dan Pilkada dengan sesuatu yang bersifat pragmatis bagi elit partai politik. sehingga faktor kekuatan modal, petahana/incumbent, koneksi sosial, ekonomi, politik yang memadai menjadi jalan untuk lahirnya kembali politik kekerabatan.

Terdapat beberapa kajian terkait praktek politik dinasti dimana politik dinasti sebagai gambaran dari pola distribusi kekuasaan keluarga (Raharjo Djati, 2013) (Nehrun, 2016). Politik kekerabatan lahir sebagai bentuk munculnya raja kecil di tingkat lokal dengan pola melakukan penataan kembali patronasi yang dimiliki dengan memperkuat basis sosial, ekonomi dan politik (Kadir, 2014). Politik kekerabatan juga menggambarkan implikasi dari disfungsi partai politik dan kuatnya pragmatism dalam meraih kemenangan kontestasi elektoral sebagai dampak dari *name recognition* (Rahmatunnisa, 2021). Politik dinasti juga sebagai strategi untuk menjaga kekuasaan dengan cara mewariskan dan menempatkan kerabat dalam posisi strategis (Suyadi, 2014).

Dalam kajian ini terdapat hal yang menarik yang akan dinarasikan dengan menempatkan kemampuan peta politik dan mesin partai politik dalam mendesign kemenangan sebagai upaya untuk melanggengkan kekuasaan dinasti politik.

## METODE

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Adapun lokasi penelitian ada di wilayah Banten dengan mengambil setting proses penguatan dinasti politik dikeluarga Atut dengan melihat kemampuan keluarga dalam melakukan peta politik dan mengendalikan mesin partai politik untuk dapat memperoleh kemenangan. Dipilihnya kasus Banten untuk menggambarkan politik dinasti karena dalam praktiknya, keluarga ratu atut secara tidak langsung menempati posisi strategis dan mempunyai kekuasaan dalam mengendalikan publik.

Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara dan dokumentasi. Data yang diambil melalui dokumentasi berasal dari data KPU, media massa serta asrsip-arsip lain yang terkait dengan data yang dibutuhkan dalam kajian peran mesin partai politik dalam pembentukan dinasti Ratu Atut di wilayah Banten. Analisis yang digunakan yaitu kajian literature yaitu studi kajian untuk menelaah secara kritis dari literature tersebut dan mengkonsepkan kembali kontribusi teoritis metodologis untuk wacana tertentu (Cooper, 2010). Penelitian ini bersifat deskriptif yaitu menguraikan secara teliti data yang didapatkan kemudian diberi penjelasan agar bisa dipahami oleh pembaca. Dalam analisis data, dilakukan melalui tahapan pengumpulan data, seleksi data, triangulasi data. Dengan demikian akan dapat disajikan data yang utuh dalam bentuk narasi diskriptif.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Rekrutmen Partai Politik dan Pembentukan Rezim Dinasti Politik Ratu Atut.

Pokok kajian yang menekankan pada peran partai politik dan kemampuan dari dinasti politik untuk bisa melanggengkan kekuasaan di keluarga Atut menjadi kajian menarik. Sudah banyak yang dilakukan dalam mengeksplorasi tema ini, namun belum banyak yang menarasikan bagaimana kemampuan keluarga dalam melakukan mapping politik serta bagaimana peran partai politik pendukung dalam mendesign kemenangan calon tersebut.

Dalam pandangan historik, posisi partai politik hadir sebagai respon transisi perubahan

masyarakat klasik menuju keadaan masyarakat lebih modern dan semakin kompleks. Kehadiran partai politik sebagai upaya untuk membendung dan mengatur semua kompleksitas yang ada di masyarakat itu. Dalam kondisi ini, Golkar sebagai partai politik yang mempunyai basis massa di wilayah Banten mempunyai peran dalam memenangkan calon yang diusung. Kedekatan Golkar dengan keluarga Atut menjadi catatan penting sejauh mana mesin partai politik dijalankan.

Pandangan peran partai politik dan memposisikan peran partai politik juga dikemukakan oleh Jimly Asshiddiqie yang menjelaskan bahwa partai politik partai politik merupakan pengelompokan rakyat berdasarkan kesamaan tertentu semacam tujuan, pandangan hidup, agama, apalagi kepentingan (Muhadam;2015). Dukungan Golkar terhadap langengnya dinasti Atut di banten memberikan gambaran bahwa pandangan dan tujuan politik Golkar tergambar pada calon yang diajukan. Suara Golkar sebagai cermin kekuatan suara pemilih menjadi pijakan untuk Atut dalam melaksanakan kegiatan yang mendukung untuk kelangengan dinastinya. Hadirnya Golkar sebagai mesin partai politik mempunyai keterkaitan erat dengan keluarga Atut dan mempunyai tujuan yang simbiosis mutualisme. Hadirnya partai politik pendukung kemenangan pencalonan kepala daerah dari keluarga Atut memberikan gambaran bahwa pengelompokan partai pendukung juga didasarkan pada kepentingan yang sama (Polinter, Ilmu, Fisip, & Vol, 2018).

Peran mesin partai politik sebagai sarana untuk melakukan rekrutmen. Rekrutmen partai dalam konteks internal partai artinya partai politik mengajak, merekrut kader/anggota baru untuk berpartisipasi melalui proses kaderisasi partai untuk keberlanjutan kepemimpinan dan kelangengan eksistensi partai politik tersebut. Golkar mempunyai kepentingan untuk menjaga basis massa dalam memberikan sumbangan suara di Golkar. Basis masa

berdasarkan pada elit lokal yang mempunyai jejaring kuat sangat menguntungkan bagi partai Golkar. Dengan demikian gambaran partai Golkar dalam mendukung kemenangan menjadi hal yang lumrah. Dengan melihat strategi dan mesin partai yang dijalankan.

Disisi rekrutmen politik, Golkar sebagai kendaraan calon untuk melakukan kompetisi mempunyai peran dan tugas yang harus diperhatikan kembali, terutama terkait dengan pola dan model seleksi perekrutan dan pengangkatan seseorang atau golongan tertentu untuk melakukan peranan dalam sistem politik dan pemerintahan. Fungsi rekrutmen menjadi sangat strategis karena merupakan kontinuitas, menjaga, dan mempertahankan *power* partai politik. Golkar melakukan pola tersebut, dimana menempatkan keluarga-keluarga Atut dalam komposisi kepengurusan Golkar. Dengan pola demikian, akan memudahkan tim kemenangan untuk kerjasama dengan partai politik dalam mendesign mesin partai politik untuk melakukan program dan kegiatan mendukung kemenangan dalam kompetisi dalam pilkada (Haboddin, 2017).

Alur kerja mesin partai politik ada beberapa hal, *Pertama*, sertifikasi merupakan tahap pendefinisian kriteria kandidat yang bisa masuk dalam kandidasi seperti aturan regulasi pemilu/pilkada, regulasi partai, dan norma sosial. Kasus dinasti keluarga Banten memberikan justifikasi bahwa partai politik mendukung penuh akan pencalonan kandidat tersebut. Dukungan tersebut hadir sebagai bentuk komitmen bahwa Golkar merupakan kendaraan yang digunakan oleh keluarga Atut untuk hadir dalam kompetisi/kandidasi kepala daerah pada saat Pilkada. *Kedua*, penominasian, seperti kemampuan *supply* kandidat yang mencakup syarat dan *demand* yaitu permintaan dari orang yang menyeleksi saat diputuskan siapa yang dinominasikan. Proses *demand* dan *supply* merupakan proses tawar menawar partai politik dengan calon untuk membangun kesepakatan bahwa calon kepala daerah dapat mengikuti kompetisi pemilihan di Pilkada dengan menggunakan Golkar sebagai *Ketiga*, Pemilu/pilkada yaitu

tahapan siapa yang nanti menjadi pemenang pemilu/pilkada. Pada tahap ketiga inilah tim kampanye dan mesin partai politik membuktikan kerjanya. Kesuksesan tim pemenangan dan partai politik dalam mengusung kandidat dapat dilihat dalam poses akhir pilkada (Fitriyah;2018).

Saat ini, proses dalam pengambilan keputusan kandidat yakni sentralistik artinya diberi, disetujui, dan ditandatangani surat mandat langsung oleh Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Politik di Jakarta. Namun, saran dan masukan dari cabang dan wilayah ke pusat hanya bersifat normatif, tidak menentukan keputusan. Sistem ini sangat eksklusif, informal, dan tidak ada standar baku yang diregulasikan oleh aturan UU dan PKPU. Pola legalitas calon pada saat Pilkada, seperti dalam kasus Banten pengajuan calon untuk Pilkada, maka Golkar sebagai partai politik pengusung mengajukan calon nyadalam hal ini keluarga dari Atut (menantu dan adiknya) untuk ikut dalam kompetisi di pilkada.

Rekrutmen politik yang dilakukan oleh Golkar dalam hal penentuan calon kepala daerah, memiliki kecenderungan bahwa Partai politik memutuskan siapa kandidat yang berpotensi memiliki keterpilihan atau elektoral yang kuat, juga finansial yang memadai dalam membiayai operasional politik kemenangan. Seperti pepatah politik yang sering terdengar “tidak ada makan siang yang gratis”. Kegiatan pilkada membutuhkan pendaan yang banyak, tidak mungkin biaya tim sukses dan saksi, amplop serangan fajar untuk meraih suara di hari H pencoblosan, konsumsi dan akomodasi operasional kemenangan tidak mampu dipenuhi kandidat. Modal merupakan bagian yang sangat vital dalam konteks untuk memenangkan kandidat dan keberlanjutan partai politik. Maka tidak jarang, visi dan misi kandidat justru dikesampingkan dalam konteks kandidasi (Prianto, 2016). Hal ini juga terjadi pada kompetisi Pilkada di wilayah Banten. Kondisi tersebut menjadi salah satu pertimbangan partai politik dalam melakukan seleksi kandidasi calon kepala daerah.

Calon kandidat yang memiliki latar belakang dinasti politik *incumbent*/petahana seperti di keluarga Ratu Atut Chosiyah akan mendapatkan keuntungan dalam bentuk popularitas (Roselina, 2018). Kondisi ini hadir karena petahana mempunyai jejaring sebelum kegiatan kompetisi pilkada berlangsung (Eriyanto, 2007). Kandidat *aji mumpung* yang mendompleng atau mempunyai manfaat dari nama petahana akan berdampak langsung terhadap elektoral kandidat, itu terlihat dari kerabat dinasti Ratu Atut Chosiyah sebagai pendatang baru namun sudah mampu memenangkan kontestasi pilkada.

Secara umum dalam kajian politik dinasti terdapat empat bentuk dinasti politik yaitu *Populism Dynasties*, *Octopussy Dynasties*, *Tribalism Dynasties*, dan *Feudalism Dynasties*. (Tabel 1)

**Tabel 1**  
**Tipologi Rezim Dinasti Politik**

Tipologi Dinasti Politik	Dasar Pembentukan	Karakter Rezim	Contoh Kasus
Populism Dynasties	Program Populis dan figure merakyat, menjaga dan mempertahankan kekuasaan, terbentuk secara <i>by incident</i> .	Semi terbuka, populis dan kuasi-otoritarian	Indramayu, Bantul, Probolinggo, dan Kendal
Octopussy Dynasties	Kharismatik figure, sinergi aktor formal dan informal, korporatisme rakyat, patrimonialisme, dibentuk <i>by design</i> .	Tertutup, oligarki, semi-demokrasi	Banten
Tribalism Dynasties	Ikatan primordialisme, klan politik,	Tertutup, Primordialistik	Sulawesi Selatan, Sulawesi Utara, dan

	reproduksi ritus-ritus budaya etnis, dan stratifikasi sosial.		Papua
Feudalisme Dynasties	Kesejahteraan, dan berstatus kerajaan.	Tertutup dan Patrimonialistik	Bali dan DIY

Sumber : Djati, 2013

Apabila dilihat dari pengkategorian diatas, maka kasus politik dinasti Ratu Atut Chosiyah di Banten terpola pada Octopussy Dynasty yang menekankan pada kharismatik figure dalam hal ini keluarga Ratu Atut Chosiyah yang dijuluki juga sebagai keluarga jawara, sinergi aktor formal dan informal dengan mengoptimalkan jejaring keluarga, kekerabatan dan simbol jawara. Dalam konteks korporatisme rakyat, keluarga dinasti Ratu Atut Chosiyah membangun jejaring dengan pemerintah melalui Golkar sebagai partai politik yang mampu memberikan legasi terhadap kemampuan untuk menarik konstituen, patrimonialisme yang hadir di keluarga Ratu Atut Chosiyah dibentuk *by design* dengan mengoptimalkan jejaring keluarga.

### Dinasti Ratu Atut dan Jejaring Kuasa

Dinasti keluarga secara desing juga memberikan gambaran pada pola Pemerintah bayangan yang dikemukakan oleh teori Agustino dan berbeda pandangan dengan teori Reno yang lebih menekankan pada pemerintah yang terbentuk diakibatkan Pemerintah formal lemah (Akbar & Purnomo, 2019). Kasus dinasti Ratu Atut Chosiyah tidak menggambarkan lemahnya pemerintahan formal, namun lebih pada kemampuan politik keluarga untuk hadir dalam kontestasi dengan dukungan Golkar sebagai partai politik. Menurut Agustino, pemerintah bayangan terbentuk ketika menyatunya aliansi yang bersifat simbiosis mutualisme antara Kepala Daerah, Pengusaha, dan Bos Lokal. Dalam kasus Ratu Atut Chosiyah, simbiosis mutualismu tergambar

dalam kerjasama yang menguntungkan antara kandidat dan Golkar sebagai parpol pengusung. Pola ketiga aliansi diatas semakin kuat apabila calon menang dan aliansi ini menentukan seluruh proyek pemerintah/negara bukan dinas yang bersangkutan (Bathoro; 2014).

Dinasti politik Ratu Atut Chosiyah di Banten membangun sejarah baru, dinasti ini terbangun sejak pemekaran Provinsi Banten dari Jawa Barat yang aktor politiknya ialah Tubagus Chasan Shohib (orang kuat lokal/bos lokal) sang "Jawara Banten" yang sudah lama mengendalikan politik di Banten. Ia termasuk tokoh sentral yang memiliki pengaruh kuat dalam mendorong pemekaran tersebut. Ketika di masa orde baru, ia memiliki koneksi politik terhadap militer dan elit Golkar. Ia juga menjadi penyokong kebutuhan logistik terhadap Kodam VI Siliwangi dan kaki tangan Kodam VI Siliwangi di Banten untuk menjaga stabilitas politik disana, karena itu Chasan Shohib diberi keistimewaan dan proyek kontruksi pemerintah. Dari sini ia membentuk perusahaan bernama PT. Ciomas Raya (Perusahaan terbesar di Banten) (Sukri; 2020).

Setelah Banten terbentuk tahun 2000, kemudian Tubagus Chasan Shohib mengatur secara perlahan bangunan dinasti dengan mengantarkan Ratu Atut Chosiyah (anak perempuan kandung) menjabat Wakil Gubernur Banten 2001-2006 dan Gubernur Banten 2007-2012/2012-2017. Selama menjadi Gubernur, Ratu Atut sangat rapi menjalankan peran politiknya dengan menempatkan suami, anak, menantu, ipar, adik kandung ke dalam posisi strategis di pemerintahan lokal dan nasional (eksekutif/legislatif). Adapun dinasti keluarga Atut di Eksekutif (Table 2) dan Legislatif (Table 3);

**Tabel 2**  
**Dinasti Ratu Atut di Eksekutif**

Eksekutif	Jabatan/Periode	Hubungan dengan Ratu Atut
Pilar Saga Ichsan (Golkar)	Wakil Walikota Tangsel 2020-2024	Keponakan
Andika Hazrumy (Golkar)	Wakil Gubernur Banten 2017-2022/Anggota DPD RI 2009-2014	Anak Pertama
Ratu Tatu Chasanah (Golkar)	Bupati Serang 2015-2020, 2020-2024/Wakil Bupati Serang 2010-2015	Adik Kandung
Tanto Warsono Arban (Golkar)	Wakil Bupati Pandeglang 2016-2024/ Ketua Komisi III DPRD Banten 2014-2016 (2016 mengundurkan diri)	Menantu/Suami Andiana (anak kedua)
Airin Rachmi Diany	Walikota Tangsel 2010-2020	Istri Adik Atut/Istri Wawan
Heryani	Wakil Bupati Pandeglang 2010-2015/Anggota DPRD Pandeglang 2009-2014 (2010 mengundurkan diri)	Ibu Tiri/Istri Kelima Tubagus Chasan Shohib (Ayah Kandung Ratu Atut Chosiyah)

**Sumber: Diambil dari berbagai sumber media**

Ditabel tersebut tergambar dengan jelas dinasti keluarga/kekerabatan yang berasal dari Ratu Atut Chosiyah dimana Ratu Tatu Chasanah (Golkar) sebagai Bupati Serang 2015-2020, 2020-2024/Wakil Bupati Serang 2010-2015 dan Airin Rachmi Diany calon Walikota Tangsel 2010-2020. Kedua orang tersebut menggunakan jalur kekerabatan sebagai pondasi untuk hadir dalam kompetisi Pilkada. Konteks inilah yang menjadikan isu dinasti

dinasti kekerabatan menarik untuk dijadikan kajian.

**Tabel 3**  
**Dinasti Ratu Atut di Legislatif**

Legislatif	Jabatan/Periode	Hubungan dengan Ratu Atut
Andiana Aprilia Hikmat	Anggota DPD RI 2019-2024	Anak kedua/Istri Tanto
Tubagus Haerul Jaman (Golkar)	Anggota DPR RI 2019-2024/ Wakil Walikota Serang 2008-2013, 2013-2018.	Adik Tiri
Ratu Ria Mariana (Golkar)	Anggota DPRD Kota Serang 2019-2024	Adik Tiri
Adde Rosi Khoerunnisa (Golkar)	Anggota DPR RI 2019-2024/ Anggota DPRD Serang 2009-2014	Menantu/Istri Andika
Aden Abdul Khaliq	Anggota DPRD Banten 2009-2014	Adik Tiri
Ratna Komalasari	Anggota DPRD Kota Serang 2009-2014	Ibu Tiri/ Istri Keenam Tubagus Chasan Shohib (Ayah Kandung Ratu Atut)
Hikmat Tomet	Anggota DPR RI 2009-2014	Suami

**Sumber: Diambil dari berbagai sumber media**

Tabel diatas memberikan penjelasan terkait dengan penempatan posisi strategis yang dimiliki oleh keluarga Ratu Atut Chosiyah. Dimana keluarganya Tubagus Haerul Jaman berasal dari Golkar dan menduduki jabatan sebagai Anggota DPR RI 2019-2024/ Wakil Walikota Serang 2008-2013, 2013-2018. Dinasti Ratu Atut juga membangun jejaring koneksi kekuatan sipil ormas (PPPSBI, Satker Ulama, dan Satker Pendekar) yang dibentuk ayahnya Chasan Shohib, organisasi bisnis (Kadin, Gapensi, dan LPJKN diketuai Tubagus Chasan Shohib), aparaturnya penegak hukum (Kepolisian, Kejaksaan, dan Pengadilan), dan partai politik.

Oleh sebab itu, hampir nyaris tidak pernah tersentuh keluarga Dinasti Ratu Atut bermasalah dengan hukum di Banten karena sangat mengakarnya jaringan kuasa Dinasti Ratu Atut di berbagai lini sektoral (Suyadi, 2014). Selain dinasti politik Ratu Atut, ada dua dinasti politik yang juga punya wilayah dinasti kekuasaan di Banten yaitu Natakusuma dan Jayabaya. Namun disisi lain, dinasti Ratu Atut menjadi isu yang menarik dengan jaringan keluarga yang kuat dan selalu memenangkan kompetisi dalam kontestasi Pilkada (Haboddin, 2017).

Pilkada Tangsel 2020 ada bukti jaringan politik Ratu Atut sangat berpengaruh di Banten. Dinasti Ratu Atut berhasil mengantarkan Benyamin Davnie dan Pilar Saga Ichsan yang hanya didukung 10 kursi partai politik yakni Golkar, sedangkan lawan politiknya Muhammad dan Rahayu Saraswati yang didukung 23 kursi dan Nurazizah didukung 17 kursi namun dimenangkan oleh keluarga Ratu Atut. Partai Golkar Banten tidak bisa terlepas dari kendali dan kekuasaan dinasti Ratu Atut sebagaimana jejaring kuasanya di Partai Golkar (Table 4) :

**Tabel 4**  
**Jaringan Keluarga Dinasti Ratu Atut di Partai Golkar**

Nama	Jabatan/Periode
Ratu Ria Maryana	Ketua DPD II Partai Golkar Kota Serang
Andika Hazrumy	- Wakil Sekretaris Jenderal DPP Partai Golkar 2019-2024 - Bendahara Umum Partai Golkar 2016-2019
Ratu Tatu Chasanah	Pimpinan DPD I Partai Golkar Provinsi Banten 2015-2020, 2020-2025
Airin Rachmi Diany	- Ketua Bid. Perempuan DPP Golkar 2019-2024 - Ketua DPD Kota Tangsel 2014-2019
Adde Rossi	Wakil Ketua Bid. Seni dan

Khoirunnisa	Budaya DPD Partai Golkar Provinsi Banten 2016-2021
Ratu Lilis Karyawati	Ketua DPD II Partai Golkar Kota Serang 2009-2014

**Sumber: diambil dari berbagai sumber Media**

Tabel diatas memberikan penjelasan bahwa jaringan keluarga yang menduduki jabatan di partai Golkar merupakan mesin partai yang digunakan untuk memenangkan kandidat yang diusulkan. Sehingga Golkar sebagai partai pengusung memainkan *design* pemenangan kandidat dengan menggerakkan kekuatan keluarga yang menduduki jabatan di partai politik tersebut (Indonesia Corruption Watch, 2018). Dengan jaringan keluarga di partai Golkar dan mempunyai konstituen yang banyak maka akan memudahkan mesin partai untuk mengerahkan dan mengarahkan pilihan konstituen terhadap calon kepala daerah yang diinginkan.

Table diatas juga menggambarkan perkembangan koalisi dinasti keluarga yang bertarung dalam kontestasi Pilkada di Banten. Dari tabel tersebut terlihat bahwa koneksi jejaring Dinasti Ratu Atut dalam membangun koalisi seperti terjadi di Pilkada Pandeglang Tahun 2016 dan 2020 lalu, Irna dari Dinasti Natakusuma yang kalah dalam Pilkada Pandeglang 2010 dengan dinasti ratu atut dan pada Pilkada 2016 dan 2020 membangun perkawinan dinasti Natakusuma dan Ratu Atut yaitu Irna berpasangan dengan tanto. Demikian juga, di Pilkada Kabupaten Serang dikuasai adik Ratu Atut yaitu Ratu Tatu Chasanah, Pilkada Tangerang Selatan dikuasai petahan Airin Rachmi Diany dan diregenerasikan ke Wakil Walikota Pilar Saga Ichsan, Pilkada Pandeglang ada Heryani diregenerasikan ke Tanto.

Kondisi kandidasi dinasti kekerabatan Ratu Atut Chosiyah didukung dengan kondisi

pasca putusan Mahkamah Konstitusi MK 33/PUU-XIII/2015 terkait legalitas calon dinasti, Partai politik dalam hal ini Golkar terbuka dalam proses rekrutmen politik, namun inklusif dan tertutup dalam proses seleksi kandidat kepala daerah. Secara praktik, faktanya calon yang berlatar belakang dinasti politik tidak bisa dituntaskan dengan hanya regulasi Undang-Undang Pilkada dan aturan normatif saja. Perlu upaya dalam hal ini perbaikan atau reformasi tata kelola partai politik yang menyeluruh.

Partai politik dalam rekrutmen politik hanya berorientasi terhadap bagaimana meraih kekuasaan dan mengesampingkan substansi makna Partai Politik sebagai pondasi demokrasi yang akan menentukan masa depan seperti apa daerah itu kedepan. Kandidat yang ketika terpilih tidak lagi berpikir bagaimana nasib masyarakat tersebut tapi memikirkan bagaimana mengembalikan modal yang telah habis dikeluarkan.

Rekrutmen partai politik seharusnya dilakukan secara transparan kepada publik karena partai adalah badan publik (Haboddin, 2017), pertanggungjawabannya juga kepada publik. Karena itu, proses rekrutmen harus semangat reformasi dimana penentuan calon harus dikembalikan kepada kewenangan cabang atau wilayah partai serta diputuskan melalui rapat pleno partai yang digelar secara terbuka kepada publik dan diawasi lembaga aparatur hukum (KPK, Kejaksaan, Kepolisian, dan PPATK) untuk penindakan pelanggaran mahar politik kepada partai dari kandidat di Pusat.

Ada beberapa aspek negatif calon dari politik dinasti; *Pertama*, terjadinya diskriminasi dalam pencalonan antara berlatar belakang dinasti politik dan tidak. *Kedua*, kemungkinan besar keterpilihan kandidat yang berlatar belakang dinasti politik untuk menghalangi perubahan kebijakan dan terjadinya perubahan sirkulasi tataran elit terhenti di satu keluarga. *Ketiga*, Politik dinasti menahan bekerjanya pengawasan kebijakan karena hanya diatur satu keluarga. *Keempat*, Praktek

politik dinasti rentan dengan praktek mengguritanya korupsi di berbagai daerah.

Dinasti politik akan berefek kepada monopoli kebijakan (Haboddin, 2017). yang diputuskan secara sepihak oleh satu keluarga dan matinya proses sirkulasi elit daerah karna dikendalikan satu klan politik yang mengatur seluruh proses proyek perencanaan dan pembangunan daerah. Dinasti politik manghentikan proses demokratisasi daerah dan mengguritanya praktek korupsi sebagaimana terungkapnya kasus korupsi yang menjerat Ratu Atut Chosiyah dan Tubagus Chaeri Wardhana alias Wawan yang ditangani oleh Lembaga Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK RI).

## SIMPULAN

Faktor langgengnya dinastik politik adalah karena realitas praktek demokrasi kapitalis dan liberal hari ini sehingga sulit bagi kandidat yang tak memiliki sumber daya finansial yang kuat untuk maju karena itu partai politik cenderung bersikap pragmatis untuk dagang tiket kandidasi petahana untuk diborong partainya dalam membangun jejaring koalisi partai saat kontestasi pilkada. Demikian juga Partai Golkar sebagai alat kendaraan politik utama Dinasti Ratu Atut dan menyebarkan sanak kerabat dekat untuk menduduki kursi pemerintahan eksekutif dan legislatif sehingga eksistensi dinasti terus bertahan sampai sekarang.

## DAFTAR PUSTAKA

- Alim Bathoro, 'Perangkap Dinasti Politik Dalam Konsolidasi Demokrasi', *Jurnal Fisip UMRAH*, 2.2 (2014), 115-1
- Effendi, Winda Roselina, 'Dinasti Politik Dalam Pemerintahan Lokal Studi Kasus Dinasti Kota Banten', *Jurnal Trias Politika*, 2.2 (2018), 233  
<<https://doi.org/10.33373/jtp.v2i2.1471>>
- Fitriyah, Fitriyah, 'Partai Politik, Rekrutmen Politik Dan Pembentukan Dinasti Politik Pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada)', *Politika: Jurnal Ilmu Politik*, 11.1 (2020), 1-

- 17<<https://doi.org/10.14710/politika.11.1.2020.1-17>>
- Muhadam, Labolo, and Ilham Teguh, 'Partai Politik Dan Sistem Pemilihan Umum Di Indonesia', *Partai Politik Dan Sistem Pemilihan Umum Di Indonesia Teori, Konsep Dan Strategi*, 1 (2015), 14, 22
- Nurhadi, Wahyu, 'Dinasti Politik Dalam Demokrasi Lokal Era Desentralisasi', April, 2020, 0–3
- 'Pasal 7 Huruf r UU Nomor 8 Tahun 2015'
- Sukri, Mhd. Alfahjri, 'Dinasti Politik Di Banten : Familisme, Strategi Politik Dan Rendahnya Partisipasi Politik Masyarakat', *Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik*, 10.2 (2020), 169–90
- Susanti, Martien Herna, 'Dinasti Politik Dalam Pilkada Di Indonesia', *Journal of Government and Civil Society*, 1.2 (2018), 111  
<<https://doi.org/10.31000/jgcs.v1i2.440>>
- Akbar, P., & Purnomo, E. P. (2019). Model Dinasti Politik di Kota Bontang. *Politik, Jurnal Wacana*, 4(2), 145–156. Diambil dari <http://jurnal.unpad.ac.id/wacanapolitik/article/view/25381>
- Haboddin, M. (2017). Politik Keluarga dalam Pilkada Serentak. *Jurnal Transformative*, 3(2), 1–15. Diambil dari <https://transformative.ub.ac.id/index.php/jtr/article/view/110>
- Indonesia Corruption Watch. (2018). *Dinasti Politik, Korupsi Kepala Daerah, dan Pilkada Serentak 2017*. Diambil dari [https://antikorupsi.org/sites/default/files/files/Siaran Pers/Press Release Dinasti Politik Korupsi Kepala Daerah dan Pilkada Serentak.pdf](https://antikorupsi.org/sites/default/files/files/Siaran%20Pers/Press%20Release%20Dinasti%20Politik%20Korupsi%20Kepala%20Daerah%20dan%20Pilkada%20Serentak.pdf)
- Kadir, A. G. (2014). DINAMIKA PARTAI POLITIK DI INDONESIA. *Sosiohumaniora*. <https://doi.org/10.24198/sosiohumaniora.v16i2.5724>
- Nehrun, I. (2016). Konflik Elit Dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota di Gorontalo Tahun 2013. *Otoritas: Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 6(1), 42. <https://doi.org/10.26618/ojip.v6i1.40>
- Polinter, J., Ilmu, P., Fisip, P., & Vol, J. (2018). Jurnal Polinter Prodi Ilmu Politik FISIP UTA'45 Jakarta Vol. 4 No. 1 (Maret-Agustus 2018), 4(1), 1–20.
- Prianto, B. (2016). Partai Politik, Fenomena Dinasti Politik Dalam Pemilihan Kepala Daerah, dan Desentralisasi. *Publisia Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 1.
- Raharjo Djati, W. (2013). Revivalisme Kekuatan Familisme dalam Demokrasi: Dinasti Politik di Aras Lokal. *Jurnal sosiologi masyarakat*, 18(2), 1–30. Diambil dari <http://journal.ui.ac.id/index.php/mjs/article/view/3726>
- Rahmatunnisa, M. (2021). Menyoal Politik Kekerabatan Di Indonesia Dalam Pelaksanaan Pilkada Serentak 2020. *Jurnal Academia Praja*, 4(2), 295–316. <https://doi.org/10.36859/jap.v4i2.483>
- Roselina, W. (2018). Dinasti Politik Dalam Pemerintahan Lokal Studi Kasus Dinasti Kota Banten. *Jurnal Trias Politika*, 2(2), 233–247.
- Susanti, M. H. (2018). Dinasti Politik dalam Pilkada di Indonesia. *Journal of Government and Civil Society*, 1(2), 111. <https://doi.org/10.31000/jgcs.v1i2.440>
- Suyadi. (2014). Bentuk dan karakter Politik Dinasti di Indonesia. *Implementation Science*, 39(1), 1–24. Diambil dari <http://dx.doi.org/10.1016/j.biochi.2015.03.025>  
<http://dx.doi.org/10.1038/nature10402>  
<http://dx.doi.org/10.1038/nature21059>  
<http://journal.stainkudus.ac.id/index.php/equilibrium/article/view/1268/1127>  
<http://dx.doi.org/10.1038/nrmicro2577>